

# Islam Yes, Demokrasi Yes

**I**SLAM telah mengalami perubahan cukup berarti dalam realitas sosial-politik Orde Baru. Perubahan formasi sosial-politik yang dilancarkan Orba melalui program dealiranisasi politik (*deconfessionalized politics*) telah menunjukkan keberhasilannya, sebagaimana tampak pada depolitisasi Islam. Program ini juga telah memperoleh legitimasi teologis-politis seperti "Islam Yes, Partai Islam No" atau rumusan hubungan Islam sebagai akidah dan Pancasila sebagai asas.

Namun tampak bahwa legitimasi ini membawa dampak tak dikehendaki berupa sikap pasif umat dalam hidup bernegara, sehingga menampakkan kekurangan daya tahan umat di depan berbagai tuntutan pembaruan politik. Sebab, umat telah terbawa kepada situasi psiko-politik untuk menggantungkan makna hidup kebangsaannya pada berbagai mekanisme yang dimotori negara. Ketika kebutuhan akan pembaruan politik mengemuka, seiring dengan berbagai pergeseran yang ber-

langsung dalam modernisasi ekonomi, jelas dibutuhkan kesadaran baru di kalangan Islam. Kesadaran itu harus dicari pada jatidiri sebagai warganegara yang berdaulat.

#### Depolitisasi Islam

Sementara ahli sempat mengajukan analisis, bahwa realitas kehidupan politik Indonesia merupakan manifestasi dari politik berdasarkan aliran. Secara singkat dapat dinyatakan, pengelompokan politik di Indonesia didasarkan pada tiga kebudayaan utama (kebudayaan tinggi priyayi, kebudayaan rakyat abangan, dan kebudayaan santri). PNI merupakan manifestasi budaya kaum priyayi, PKI berbasis kaum abangan, dan Masyumi adalah santri. Demikian misalnya Clifford Geertz (1960), Robert Jay (1963) dan Don Emmerson (1976).

Peta aliran politik ini sudah menampakkan kelemahannya waktu itu (hingga paruh pertama 1960-an), terutama dalam menjelaskan saling-silang antara kaum abangan pendukung PNI dan PKI, misalnya, atau perbedaan santri ke dalam kelompok modernis dan tradisional. Kelemahan serius lainnya dalam teori ini juga dirasakan, misalnya karena kedudukan negara sebagai aktor politik tak dipertimbangkan. Itu sebabnya, setelah 1965 lalu berkembang teori-teori baru dalam

analisis politik Indonesia—seperti teori *patron-client* (Werheim 1969), *bureaucratic polity* (Karl Jakson dan Lucian Pye 1979), atau *bureaucratic capitalism* (Richard Robison 1981).



**M. Fajrul Falaakh**

Staf Pengajar Fakultas hukum UGM, Yogyakarta

Dengan kata lain berlaku depolitisasi aliran (termasuk Islam). Prestasi nyata dealiranisasi itu ialah penghapusan partai-partai politik Islam, yang ditempuh secara bertahap melalui fusi, dan pemotongan ikatan tradisional partai-partai Islam dengan ormas-ormas Islam. Namun, yang terakhir ini tampak berlangsung setengah hati. Tak hanya Golkar yang memanfaatkan imbauan-imbauan tradisional Islam, negara pun berhasil memobilisir potensi-potensi masyarakat dengan simbol-simbol Islam. Dalam perkembangannya, berbagai kelompok aliran (keagamaan, sekuler, moderat, nasionalis maupun sosialis) juga turut merasakan dampak efektifitas negara dalam mendominasi berbagai sektor kehidupan politik.

Teori aliran tampak cukup berarti untuk menjelaskan tahap disintegrasi politik pra-Orba, yang ditandai dengan menguatnya konflik ideologis di antara kekuatan-kekuatan politik di Tanah-Air. Tapi harus diakui, skisma kebudayaan politik bukanlah satu-satunya faktor penentu. Berbagai faktor lain, seperti perjuangan kelas dari PKI yang memanipulir keanekaragaman aliran, pergeseran kepentingan politik pihak militer (Angkatan Darat), pribadi Bung Karno, atau ketakpuasan kalangan intelektual dan eks-Masyumi, juga perlu dipertimbangkan untuk mengkaji situasi waktu itu.

Setelah PKI melakukan kudeta yang gagal dan berhasil ditumpas, Orba muncul dengan modernisasi ekonomi. Politik (aliran) sebagai panglima digantikan dengan ekonomi sebagai panglima. Keputusan dan kebijakan politik lalu disandarkan pada pertimbangan modernisasi tersebut. Untuk jujuan itu, trilogi pembangunan (stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan) merupakan formula yang selalu dicoba wujudkan.

Pada sisi stabilitas, upaya-upaya restrukturisasi politik dan dealiranisasi dijalankan. Wujudnya, militer memainkan peranan menentukan, birokrasi dapat dikendalikan secara terpusat, Golkar mendominasi panggung politik dari Pemilu ke Pemilu, partai-partai disederhanakan menjadi tiga, kebijakan masa mengambang diterapkan, ideologi partai dilengkapi dengan asas Pancasila, kemudian asas tunggal diberlakukan untuk ketiga partai politik dan semua organisasi sosial-kemasyarakatan.

#### Warga negara dan demokrasi

Dalam perjalanan yang tak selalu mulus sekitar dua dasa warsa terakhir, tujuan pertumbuhan ekonomi memang dapat diwujudkan. Namun, eksek pembangunan diakui bukan tak ada. Di antara eksek yang dewasa ini tak diinginkan ialah ketidakadilan sosial, pemusatan strategi dan pola pembangunan (sentralisasi), kurangnya ruang bagi demokrasi dan peran mandiri masyarakat seperti tercermin pada budaya mohon petunjuk dan restu politik, lemahnya infrastruktur politik, lembaga perwakilan yang tak artikulatif karena terlalu banyak berkonsultasi dengan eksekutif, atau lemahnya pengawasan pembangunan yang mengakibatkan inefisiensi ekonomi, kebocoran anggaran dan korupsi.

Modernisasi memang memerlukan pembaruan. Perannya selama ini telah mengesankan determinisme terhadap sektor-sektor lain dalam kehidupan: semuanya demi pertumbuhan ekonomi. Kesadaran akan kelemahan-kelemahan itu agaknya telah muncul. Terbukti, lembaga perwakilan didorong makin aktif, keterbukaan dan demokratisasi digelindingkan, arus bawah ditolerir dengan hati-hati, dan otonomi daerah dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat (termasuk dalam menanggung beban pajak dan retribusi daerah yang meningkat).

Dalam stabilitas politik Orba, Islam telah mengalami depolitisasi atau dealiranisasi. Formula simbolik untuk itu ialah hubungan Islam dan asas tunggal, yang sesungguhnya juga bermakna menempatkan umat sebagai anggota utuh sebuah republik yang demokratis. Sejauh asas tunggal dimaknakan sebagai modernisasi ekonomi dan digunakan untuk menghadapi pihak-pihak yang mengajukan keseimbangan dalam kehidupan, misalnya, maka akan cukup memprihatinkan kepentingan bangsa secara menyeluruh. Hal ini justru akan membuktikan, bagaimana asas tunggal direduksi.

Dalam proses perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan pembangunan tersebut di muka, kiranya umat harus makin menempatkan diri sebagai warganegara. Dalam kedudukan ini mereka mengambil peran aktif, misalnya untuk ikut serta mengapresiasi tuntutan menanggung beban pembangunan di daerah. Wujud apresiasi tak hanya secara pasif memenuhi tuntutan-tuntutan negara, melainkan juga secara kritis berperan aktif dalam proses hidup bernegara. Tetapi dalam kerangka deorpolisasi Islam, transformasi diri umat ini memungkinkannya untuk mengatakan Islam Yes, Demokrasi Yes.\*\*\*

**MEDIA  
INDONESIA**

JUMAT, 1 JULI 1994

**4**